



1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK) telah menetapkan 9 SPM untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan 15 SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3), serta permintaan Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penerapan SPM di daerah, maka Pemerintah Provinsi Jambi memacu pencapaian SPM dengan menyusun Peraturan Gubernur Jambi untuk masing-masing Bidang SPM tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dengan adanya Peraturan Gubernur tersebut, dimaksudkan untuk memudahkan SKPD dalam pencapaian target SPM sebagaimana batas waktu yang ditetapkan secara Nasional, dan bertujuan untuk memberikan landasan hukum kepada SKPD dalam pengintegrasian



rencana pencapaian SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Penetapan target dalam Peraturan Gubernur tersebut, telah dilakukan analisis terhadap kemampuan dan potensi daerah Provinsi Jambi. Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per : 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;



10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 ;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Provinsi Jambi.
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Jambi.
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian Provinsi Jambi.
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan Provinsi Jambi.
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi Jambi.

C. KONDISI UMUM DAERAH

C.1. Kondisi Geografis

C.1.1. Letak Wilayah dan Topografi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0°45'-2°45' Lintang Selatan dan 101°10'-104°55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

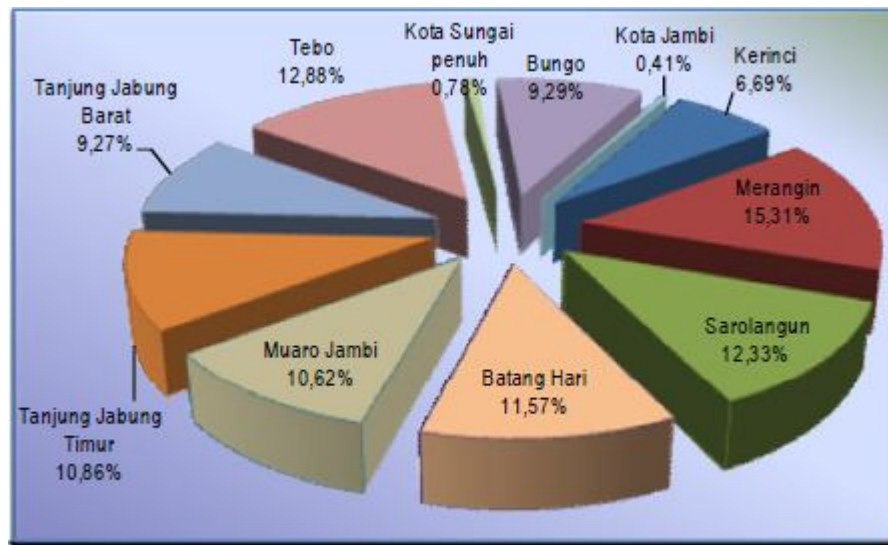
Gambar 1.1. Peta Provinsi Jambi



Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² yang terdiri dari :

1. Kabupaten Kerinci 3.808,50 Km² (7,13%),
2. Kabupaten Bungo 6.461,00 Km² (12,09%),
3. Kabupaten Tebo 6.802,59 Km² (12,73%),
4. Kabupaten Merangin 7.451,30 Km² (13,94%),
5. Kabupaten Sarolangun 6.175,43 Km² (11,56%),
6. Kabupaten Batanghari 5.804,83 Km² (10,86%),
7. Kabupaten Muaro Jambi 5.246,00 Km² (9,82%),
8. Kabupaten Tanjab Barat 5.645,25 Km² (10,56%),
9. Kabupaten Tanjab Timur 5.444,98 Km² (10,19%),
10. Kota Jambi 205,38 Km² (0,38%).
11. Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,73%).

Gambar 1.2. Persentase Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota



(Sumber : BPS Provinsi, Jambi dalam angka 2011)

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian, yakni :

- 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
- 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan
- 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera



Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 1.1. Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
1	2	3	4
Dataran Rendah (0 – 100)	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari
Dataran sedang (100 – 500)	903.180	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tinggi (> 500)	765.655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah	5.100.000	100	

Sumber : Bappeda Prov. Jambi, 2011

C.1.2. Klimatologi

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.



Sepanjang tahun 2012, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada tahun 2012 mencapai 2061,0 mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 3,2 jam perhari dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 85,8%. Suhu udara rata-rata mencapai 26,5°C, sedangkan untuk dataran tinggi di Wilayah Barat mencapai 21,9°C.

Tabel 1.2. Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun

Uraian <i>Explanation</i>	Stasiun/ <i>Station</i>		
	Depati Parbo Kerinci	Sultan Thaha Jambi	Klimatologi Jambi
(1)	(2)	(3)	(4)
Suhu/<i>Temperature</i> (°C)			
Maksimum/ <i>Maximum</i>	28,2	33,8	33,2
Minimum/ <i>Minimum</i>	17,6	21,8	21,9
Rata-rata/ <i>Average</i>	21,9	26,9	26,5
Kelembaban Udara <i>Humidity</i> (%)			
Maksimum/ <i>Maximum</i>	97,7	97,9	99,1
Minimum/ <i>Minimum</i>	47,1	49,3	56,8
Rata-rata/ <i>Average</i>	80,4	82,5	85,8
Tekanan Udara <i>Atmospheric Pressure</i> (mb)	1 015,4	1 010,2	-
Kecepatan Angin/ <i>Wind Velocity</i> (knot)	8,5	5,0	1,3
Curah Hujan/Jumlah <i>Precipitation/Total</i> (mm)	1 454,0	2 295,0	2 061,0
Penyinaran Matahari/ <i>Duration Irradiating of Sun</i> (Jam/hari)	3,8	4,5	3,2

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka 2011

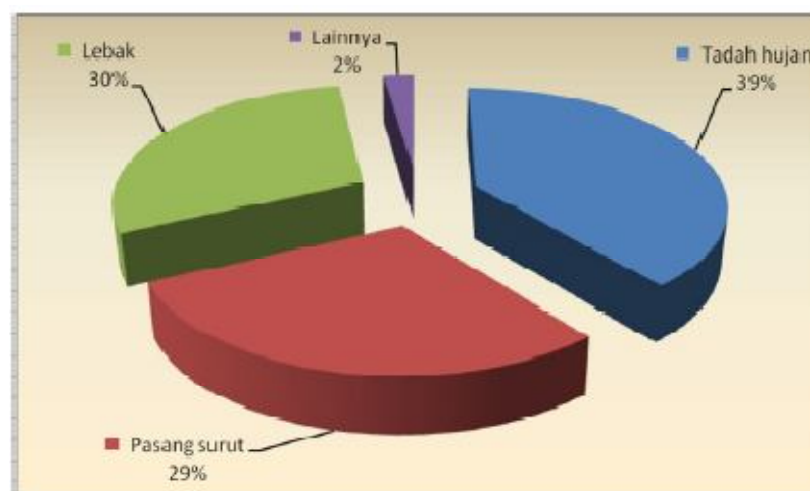


C.1.3. Penggunaan Lahan

Sebagian besar lahan di Provinsi Jambi digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian, baik pertanian lahan sawah maupun pertanian lahan bukan sawah. Berdasarkan karakter kompleks ekologi, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Berdasarkan data Jambi Dalam Angka Tahun 2011, Lahan di Provinsi Jambi pada tahun 2011 seluas 5.321.223 hektar, terdiri dari lahan sawah 169.599 hektar, luas pertanian bukan sawah 3.227.097 hektar dan lahan bukan pertanian 1.916.803 hektar.

Gambar 1.3. Persentase luas lahan sawah dirinci menurut jenis pengairan



Sumber : BPS Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka 2011



C.1.4. Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan)
- b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan-kawasan strategis yang berada di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis Bungo - Tebo
5. Kawasan strategis Merangin - Sarolangun
6. Kawasan strategis Sungai Penuh dan sekitarnya

Berdasarkan penunjukan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, dimana kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi luas $\pm$ 2.179.440,00 Ha atau 42,73% dari keseluruhan luas Provinsi Jambi. Adapun luasan tersebut sesuai dengan pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar



Alam 30.400,00 Ha (1,39%), Taman Nasional 608.630,00 Ha (27,92%), Taman Hutan Raya 36.660,00 Ha (1,68%), Hutan Wisata Alam 430,00 Ha (0,02%), Hutan Lindung 191.130,00 Ha (8,77%), Hutan Produksi Terbatas 340.700,00 Ha (15,63%), Hutan Produksi Tetap 971.490,00 Ha (44,57%).

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsor, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

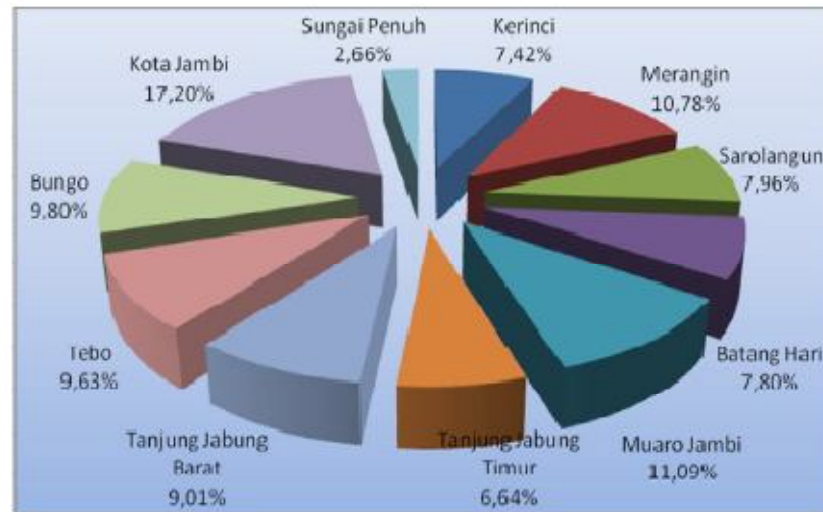
C.2. Kondisi Demografi

C.2.1. Penduduk

Menurut data BPS Provinsi Jambi dalam Jambi Dalam Angka Tahun 2011, penduduk Provinsi Jambi berjumlah ±3.169.814 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 63,19 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk terbesar berada di Kota Jambi yakni sebesar 2.653,91 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah yakni berada di Kab. Tanjung Jabung Timur yakni sebesar 38,64 jiwa/km². Sebagaimana karakter ibukota Provinsi pada umumnya yaitu sebagai pusat pemerintahan, industri dan perdagangan, maka kota Jambi juga merupakan daerah tujuan migrasi.



Gambar 1.4. Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota



Sumber : BPS Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka 2011

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di dua wilayah timur dan barat terlihat relatif seimbang, yaitu 51% untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 49% untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo).

Sedangkan pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi mencapai 2,56% pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penduduk laki-laki berjumlah 1.622.499 jiwa dan perempuan berjumlah 1.547.315 jiwa. Dari jumlah penduduk di Provinsi Jambi, terdapat tiga daerah dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2011 yaitu Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Merangin. Sedangkan daerah dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kota Sungai Penuh 84.357 jiwa. Penurunan jumlah penduduk Kabupaten Kerinci yang disebabkan oleh terbentuknya Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru sejak 8 Nopember 2008.

Jumlah penduduk berdasarkan pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Provinsi Jambi per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Warga Negara Indonesia <i>Citizen of Indonesia</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kerinci	115 790	119 461	235 251
2. Merangin	175 983	165 580	341 563
3. Sarolangun	129 225	123 196	252 421
4. Batang Hari	129 888	117 498	247 386
5. Muaro Jambi	184 017	167 536	351 553
6. Tanjung Jabung Timur	108 607	101 813	210 420
7. Tanjung Jabung Barat	148 793	136 938	285 731
8. Tebo	157 335	147 867	305 202
9. Bungo	158 487	152 250	310 737
10. Kota Jambi	274 845	270 348	545 193
11. Kota Sungai Penuh	40 950	43 407	84 357
JUMLAH/ Total 2011	1 623 920	1 545 894	3 169 814
2010	1 581 110	1 511 155	3 092 265
2009	1 444 783	1 389 381	2 834 164
2008	1 422 235	1 366 034	2 788 269
2007	1 398 700	1 343 496	2 742 196

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka 2011

C.2.2. Tenaga Kerja

Indikator keberhasilan dari bidang ketenagakerjaan tergambar dari menurunnya tingkat pengangguran, dimana tingkat pengangguran pada tahun 2011 sebanyak 83.278 orang, menurun menjadi 60.169 orang pada tahun 2012 dengan persentase 27,75% dari tahun 2011. Untuk jumlah angkatan kerja pada tahun 2011 sebanyak 1.545.683 orang, mengalami penurunan menjadi 1.459.167 orang pada tahun 2012. Angka kesempatan kerja pada Provinsi Jambi pada tahun 2011 sebanyak 1.462.405 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 1.434.998 orang. Sedangkan untuk upah minimum Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari Rp900.000,00 pada tahun 2010, menjadi Rp1.028.000,00 di tahun 2011, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp1.142.000,00.



C.3. Kondisi Ekonomi

C.3.1. Potensi Unggulan Daerah

Provinsi Jambi terletak di tengah Pulau Sumatera merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang mempunyai potensi cukup besar tersebut antara lain; perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Untuk sektor bahan pertambangan dan penggalian yang menjadi potensi unggulan daerah adalah batu bara, gas bumi, minyak, tambang mineral lainnya. Sedangkan potensi industri pengolahan di Provinsi Jambi yang potensial untuk dikembangkan terutama untuk pengolahan dengan bahan baku (*crude palm oil*), *crumb rubber*, *virgin coconut oil (Vico)*, *cassia vera*, serta olahan dari produk tanaman pangan dan produk dari ikan.

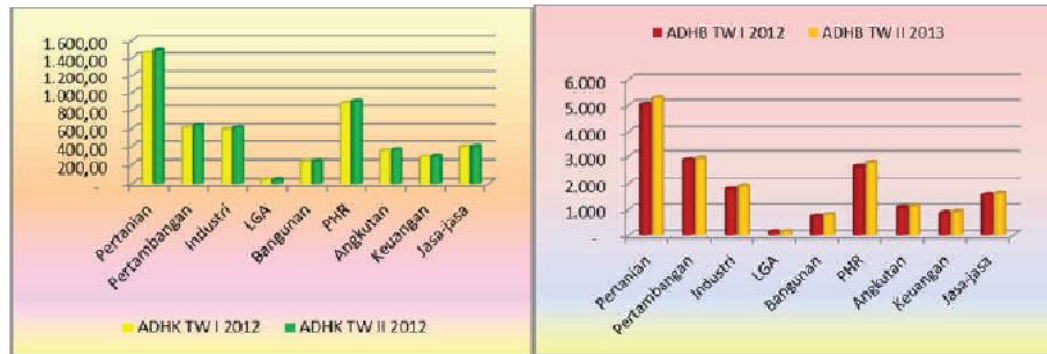
Bila dilihat dari Komoditi unggulan Provinsi Jambi, maka terdapat 12 komoditi unggulan yang didominasi dari berbagai sub-sektor pertanian antara lain: Karet, Kelapa sawit, Kelapa dalam, Cassievera, Kopi, Buah-buahan, Pinang, Nenas, Perikanan Laut dan darat dan Peternakan serta hasil pertambangan umum lainnya.

C.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

C.3.2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan 2000 Triwulan I-2012 Dan Triwulan II-2012

Pada triwulan I tahun 2012 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 16.631,6 milyar, kemudian pada triwulan II tahun 2012 naik hingga mencapai Rp. 17.417,6 milyar. PDRB triwulan I tahun 2012 atas dasar harga konstan tahun 2000, mencapai Rp. 4.837,5 milyar dan triwulan II tahun 2012 menjadi Rp. 4.972,2 milyar.

Gambar 1.5. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi No 45/08/15/Th.VI, 2012

Menurut PDRB atas dasar harga berlaku, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto terbesar pada triwulan II tahun 2012 adalah Sektor Pertanian sebesar Rp. 5.275 milyar atau mempunyai andil sebesar 30,3 persen terhadap total PDRB, diikuti Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 2.912 milyar (16,7 %); Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp. 2.762 milyar (15,9 %), kemudian disusul Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 1.895 milyar (10,9 %); Sektor Jasa-jasa Rp. 1.586 milyar (9,1 %) dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp. 1.116 milyar (6,4 %).

Sektor ekonomi lainnya masing-masing menghasilkan nilai tambah bruto antara Rp. 500 hingga Rp. 1.000 milyar yaitu Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar Rp. 914 milyar (5,2 %), Sektor Bangunan sebesar Rp. 804 milyar (4,6%). Satu-satunya sektor yang memberikan sumbangan masih dibawah Rp. 500 milyar adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar Rp. 152 milyar (0,9 %). Sedangkan menurut PDRB atas dasar harga konstan 2000, Sektor Pertanian memberikan nilai tambah bruto sebesar Rp. 1.485 milyar atau 29,9 persen dari total PDRB.

Nilai tambah bruto Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp. 899 milyar atau 18,1 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 640 milyar (12,9 %), kemudian diikuti dengan Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 612 milyar (12,3 %). Sektor Jasa-jasa Rp. 398 milyar (8,0 %), Sektor Pengangkutan dan Komunikasi



sebesar Rp. 364 milyar (7,3 %), serta untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar Rp. 290 milyar (5,8 %), Sektor Bangunan memberikan Nilai Tambah Bruto sebesar Rp. 241 milyar (4,8 %). Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih memberikan Nilai Tambah Bruto terkecil yaitu di Rp. 42 milyar atau hanya (0,8 %).

Tabel 1.4.

**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000
(Milyar Rupiah)**

	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2000	
		Tw I 2012	Tw II 2012	Tw I 2012	Tw II 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perikanan, Pelembakan, Kehutanan, dan Perikanan	5.032,76	5.274,94	1.451,19	1.485,48
2	Perambangan dan Peggalian	2.856,07	2.912,42	609,75	639,90
3	Industri Pengolahan	1.773,83	1.894,65	592,45	612,09
4	Lisfik, Gas, dan Air Bersih	146,74	152,22	41,54	42,22
5	Bangunan	740,91	804,26	232,29	240,82
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.613,51	2.762,23	879,49	899,17
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.057,72	1.115,78	354,90	364,16
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	854,06	914,39	282,66	290,45
9	Jasa-jasa	1.536,50	1.586,50	393,20	397,87
	PDRB	16.631,60	17.417,59	4.837,45	4.972,17
	PDRB tanpa Migas	14.241,13	15.030,67	4.363,85	4.472,74

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi No 45/08/15/Th.VI, 2012

C.3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Tahun 2012

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi yang digambarkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000, pada triwulan II tahun 2012 meningkat sebesar 2,8 persen bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini terjadi pada semua sektor perekonomian dengan sedikit perlambatan laju pertumbuhan di Sektor Pertanian. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan II tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 2,4 persen yang merupakan sektor dengan laju pertumbuhan relatif



sama dibanding triwulan sebelumnya. Kenaikan ini relatif sama bila dibandingkan dengan triwulan lalu yang tumbuh sebesar 2,4 persen.

Subsektor yang mengalami pertumbuhan melambat pada triwulan II tahun 2012 ini adalah subsektor tanaman bahan makanan yang hanya tumbuh 1,9 persen sementara triwulan I tahun 2012 yang lalu tumbuh 4,8 persen. Subsektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah subsektor perkebunan sebesar 2,9 persen, diikuti subsektor kehutanan sebesar 2,8 persen. Subsektor lainnya tumbuh dibawah 2 persen yaitu subsektor perikanan yang mengalami peningkatan sebesar 1,8 persen dan subsektor peternakan tumbuh 1,1 persen.

Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II ini mengalami pertumbuhan relatif tinggi dibanding triwulan sebelumnya yaitu sebesar 4,9 persen, sementara triwulan lalu tumbuh minus 11,3 persen. Laju pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan ini terutama didukung oleh Subsektor Pertambangan Migas yang tumbuh sebesar 5,7 persen diikuti subsektor Pertambangan Tanpa Migas dan Subsektor Penggalian masing-masing sebesar 3,5 persen dan 2,2 persen.

Tabel. 1.5.

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persentase)				
Lapangan Usaha	Tw I 2012 terhadap Tw IV 2011	Tw II 2012 terhadap Tw I 2012	Tw III 2012 terhadap Tw II 2011	Sumber Pertumbuhan Tw II 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,4	2,4	7,3	0,7
2. Pertambangan dan Penggalian	-11,3	4,9	-1,8	0,6
3. Industri Pengolahan	-3,0	3,3	6,5	0,4
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,1	1,6	4,9	0,0
5. Bangunan	1,5	3,7	9,6	0,2
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,1	2,2	10,3	0,4
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,8	2,6	7,3	0,2
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,4	2,8	7,8	0,2
9. Jasa-jasa	0,3	1,2	4,3	0,1
PDRB	-0,8	2,8	6,3	2,8

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi No 45/08/15/Th.VI, 2012



Selain sektor pertambangan, pertumbuhan yang cukup signifikan pada triwulan II tahun 2012 ini terjadi pada Sektor Bangunan yaitu sebesar 3,7 persen. Tingginya laju Sektor Bangunan pada triwulan ini lebih disebabkan oleh mulai meningkatnya kinerja konstruksi sebagian besar proyek fisik pemerintah diberbagai sektor akibat adanya himbauan dari pemerintah pusat agar semua pengerjaan proyek fisik dilaksanakan pada awal tahun. Hal ini juga diikuti oleh proyek swasta dibidang properti meskipun ada regulasi perumahan yang sedikit menjadi kendala developer. Sudah dimulainya program SAMISAKE yang berbentuk bedah rumah yang juga merupakan pengerjaan sektor bangunan ikut menyumbang pada sektor ini.

Sektor lain dengan laju yang cukup tinggi adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar 3,3 persen. Industri yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi pada triwulan ini adalah industri karet sebesar 4,4 persen dan industri barang dari kayu sebesar 4,2 persen. Tingginya permintaan meubel dan perlengkapan rumah tangga sebelum masa lebaran menjadi penyebab tingginya laju industri ini. Sektor lainnya yaitu sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusanaan tumbuh sebesar 2,8 persen, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 2,6 persen. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tumbuh 2,2 persen, ini didukung oleh pertumbuhan yang signifikan pada Subsektor Hotel yang mencapai 3,3 persen dimana pada triwulan sebelumnya hanya tumbuh 1,3 persen. Sektor-sektor lain tumbuh dibawah 2 persen yaitu Sektor Listrik Gas dan Air Bersih sebesar 1,6 persen dan sektor Jasa – jasa sebesar 1,2 persen.

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi pada triwulan ini didorong oleh peningkatan kinerja sektor industri secara luas yang menjadi mesin pertumbuhan dan mendorong peningkatan kinerja sektor jasa (*service*). Pada sisi lain, perekonomian Jambi juga mempunyai ketergantungan yang relatif tinggi terhadap Sektor Pertambangan dan Penggalan sehingga membuat struktur perekonomian Provinsi Jambi tidak banyak mengalami pergeseran dari Sektor Primer.

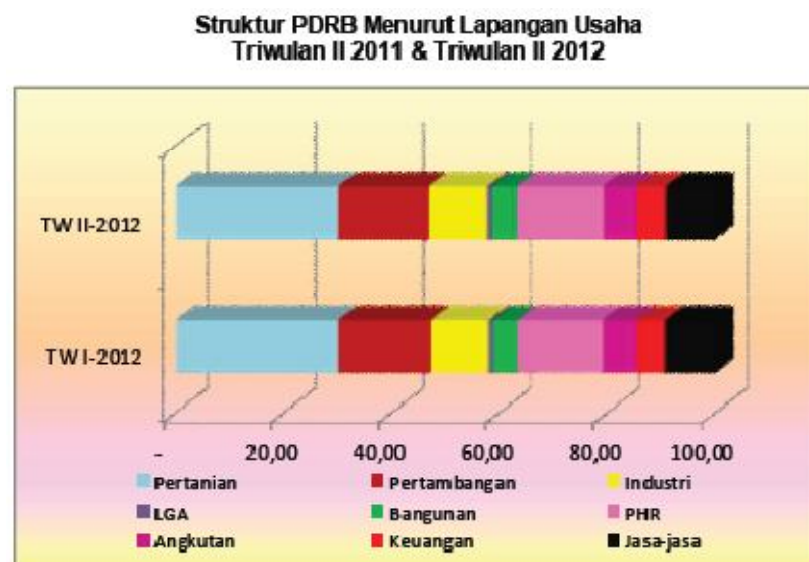


C.3.2.3. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2012 dan Triwulan II Tahun 2012

Perbandingan peranan antar sektor ekonomi pada triwulan II tahun 2012 menunjukkan bahwa hampir 50 puluh persen (47,0 %) dari PDRB atas dasar harga berlaku berasal dari Sektor Primer (Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan & Penggalian). Sektor sekunder (Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas dan Air; serta Sektor Bangunan) memberikan kontribusi sebesar 16,4 persen, sementara sektor tersier (Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; dan Sektor Jasa-jasa) memiliki pangsa sebesar 36,6 persen dari total PDRB.

Struktur ini sedikit berbeda jika dibandingkan triwulan yang sama tahun 2011 dimana terjadi penurunan peran Sektor Pertambangan & Penggalian, sektor-sektor sekunder dan juga sektor tersier kecuali Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor Pertanian juga menunjukkan peningkatan pangsa terhadap PDRB. Jika tidak terjadi perubahan yang signifikan pada sumber pertumbuhan triwulan berikutnya maka diperkirakan struktur perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2012 tidak akan mengalami pergeseran yang berarti.

Gambar 1.6.





Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi No 45/08/15/Th.VI, 2012

Gambar 1.6.

Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha
Triwulan II 2011 dan Triwulan II 2012 dan Tahun 2010-2011 (persen)

Lapangan Usaha	Tw II 2011	Tw II 2012	2010	2011	2011 PUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Keluhan dan Perikanan	29,5	30,3	28,4	29,4	14,7
2. Pertambangan dan Penggalian	19,2	16,7	16,2	19,1	11,9
3. Industri Pengolahan	10,6	10,5	11,1	10,7	24,3
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,9	0,9	0,9	0,9	3,8
5. Bangunan	4,3	4,6	4,6	4,3	10,2
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,8	15,5	14,6	16,0	13,8
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,4	6,4	6,6	6,4	5,6
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,1	6,3	6,2	6,1	7,2
9. Jasa-jasa	9,4	9,1	9,6	9,3	10,5
PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
PDRB Tanpa Migas	83,9	80,4	84,7	83,2	51,3

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi No 45/08/15/Th.VI, 2012

C.3.2.4. PDRB Menurut Penggunaan

PDRB Provinsi Jambi triwulan II tahun 2012 jika ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan sebagian besar pangasanya disumbang oleh pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai mencapai Rp. 17.418 milyar atau 59,0 persen. Nilai Ekspor Provinsi Jambi yang cukup besar hampir selalu diikuti oleh nilai Impor yang juga relatif besar dan pada triwulan ini ekspor *netto* bernilai negatif. Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan komponen makro yang kedua terbesar dengan nilai Rp. 3.385 milyar atau 19,4 persen dari nilai pengeluaran agregat diikuti Pengeluaran Pemerintah senilai Rp. 3.376 milyar atau 19,4 persen.



Tabel 1.7.

PDRB Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 (Milyar Rupiah)				
Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2000	
	Triwulan I 2012	Triwulan II 2012	Triwulan I 2012	Triwulan II 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pengeluaran konsumsi Rumah tangga	9.988,86	10.269,55	3.324,86	3.360,87
2 Pengeluaran konsumsi Pemerintah	3.126,15	3.375,85	928,53	953,42
3 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba	108,74	112,55	33,46	34,21
4 Pembentukan modal Tetap Bruto (PMTB)	3.254,05	3.384,69	825,53	849,54
5 Perubahan Stok	455,40	475,64	158,22	161,82
6 Ekspor	7.899,00	8.583,33	3.185,80	3.447,22
7 Dikurangi Impor	8.200,51	8.784,00	3.618,96	3.834,92
PDRB	16.631,60	17.417,59	4.837,45	4.972,17

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi No 45/08/15/Th.VI, 2012

Pengeluaran agregat pada triwulan II tahun 2012 digerakkan oleh beberapa komponen permintaan. Pertumbuhan ekspor yang tinggi (8,2 %) digerus oleh pertumbuhan impor yang juga relatif cukup tinggi (6,0 %) sehingga terjadi pertumbuhan yang relatif kecil pada ekspor *netto*. Hal yang menggembirakan adalah tingginya pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar 2,9 persen diikuti pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah sebesar 2,7 persen dimana pada triwulan sebelumnya komponen Pengeluaran Pemerintah ini mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 1.8.

Taju Pertumbuhan Komponen-Komponen PDRB Penggunaan (Persentase)				
No.	Jenis Penggunaan	Triwulan I 2012 Htd. Triwulan IV 2011	Triwulan II 2012 Htd. Triwulan I 2012	Triwulan II 2012 Htd. Triwulan II 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga	0,5	1,1	5,1
2.	Pengeluaran konsumsi Pemerintah	-5,3	2,7	9,3
3.	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba	2,9	2,0	10,0
4.	Pembentukan modal Tetap Bruto (PMTB)	0,6	2,9	9,8
5.	Perubahan Stok	0,5	2,3	19,7
6.	Ekspor	-5,9	8,2	-1,1
7.	Dikurangi Impor	-4,9	6,0	0,4
PDRB Provinsi Jambi		0,1	2,8	6,3



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi No 45/08/15/Th.VI, 2012

Meskipun nilai Konsumsi Rumah Tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam penggunaan PDRB Provinsi Jambi namun pada triwulan II tahun 2012 *share* dari Konsumsi Rumah Tangga ini hanya sebesar 59,0 persen atau lebih rendah dari triwulan I 2012 yang mencapai 60,1 persen. Peran Pengeluaran Pemerintah meningkat dari 18,8 persen menjadi 19,4 persen.

Tabel 1.9.

**Distribusi PDRB Provinsi Jambi Menurut Penggunaan
Triwulan II 2011 dan Triwulan II 2012 (Persentase)**

No.	JENIS PENGGUNAAN	Trw II 2011	Trw II 2012	2011	2011 PDB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga	59,4	59,0	59,9	54,6
2.	Pengeluaran konsumsi Pemerintah	17,5	19,4	18,3	9,0
3.	Pengeluaran Konsumsi Lembaga NirLaba	0,6	0,7	0,6	*
4.	Pembentukan modal Tetap Bruto (PMTB)	18,7	19,4	18,8	32,0
5.	Perubahan Stok	2,5	2,7	2,5	3,0
6.	Ekspor	57,9	49,3	55,8	26,3
7.	Dikurangi Impor	56,6	50,4	55,9	24,9
PDRB Propinsi Jambi		100,0	100,0	100,0	100,0

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi mulai mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik jika dilihat dari mulai berkurangnya pangsa konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB.

D.1. Kondisi Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan



efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2012 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya berbagai penghematan dari sisi belanja dan pembiayaan.

D.1.1 Kondisi Pendapatan Daerah

D.1.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah.

Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.



Berdasarkan hal tersebut, pada tahun anggaran 2012 Pemerintah Provinsi Jambi tidak membuat kebijakan terhadap sumber penerimaan baru, akan tetapi lebih mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah dan Tarif yang diatur didalamnya terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Penerapan Samsat Keliling, dimana Samsat Keliling ini adalah bentuk pelayanan prima yang dilakukan oleh petugas Samsat di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota untuk mendekati Wajib Pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Pembentukan Pos Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, pada Tahun 2011 telah dibangun 4 (empat) pos Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor yakni :
 - a. Pos Pelayanan di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo
 - b. Pos Pelayanan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi
 - c. Pos Pelayanan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
 - d. Pos Pelayanan di Kecamatan Tempino Kabupaten Muaro Jambi
4. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, adalah suatu upaya untuk menghapuskan Pajak dan Denda terhadap Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor. 2 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 dan Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 6 April 2011. Dalam pelaksanaannya cukup memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.



5. Pelaksanaan Pajak Progresif, yang bertujuan untuk :
 - a. Menjaring Bea Balik Nama bagi pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu (BBN-II).
 - b. Meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Perhitungan besaran jumlah pajak yang terhutang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah. Pajak Progresif ini mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2011.
6. Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Luar Daerah, dengan tarif 0% mulai dilaksanakan tanggal 1 November 2011 sampai dengan 31 April 2012.
7. Razia rutin kendaraan bermotor, kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Pendapatan Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kepolisian dan PT. Jasa Raharja. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN-II. Dalam pelaksanaannya Tim menjaring pemilik kendaraan yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kendaraan dengan Nomor Polisi luar Provinsi Jambi yang beroperasi di Provinsi Jambi.

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah, hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan dari target pendapatan khususnya pada sisi pajak selama tahun 2012.

D.1.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Selama tahun 2012 realisasi pendapatan daerah, memperlihatkan peningkatan, terlihat pada tabel 3.1 bahwa PAD tahun anggaran 2012 terealisasi sebesar Rp.984.986.423.382,00 atau mencapai 130,75 % dari target yang ditetapkan. Realisasi PAD tahun anggaran 2012 lebih tinggi 0,50 % dibandingkan dengan realisasi PAD tahun anggaran 2011.



Tabel 1.10. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011 – 2012

NO.	PENDAPATAN	2011	2012*	+/- (%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	TARGET	639,954,215,660.00	753,327,707,083.00	17.72
	REALISASI	980,043,613,551.00	984,986,423,282.00	0.50
	LEBIH (KURANG)	340,089,397,891.00	231,658,716,199.00	
	REALISASI (%)	153.14	130.75	
2	DANA PERIMBANGAN			
	TARGET	976,008,164,020.00	1,085,733,978,686.00	11.24
	REALISASI	1,069,193,273,927.00	1,147,683,865,827.23	7.34
	LEBIH (KURANG)	93,185,109,907.00	61,949,887,141.23	
	REALISASI (%)	109.55	105.71	
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
	TARGET	-	342,227,599,660.00	-
	REALISASI	24,274,259,405.00	335,522,200,481.64	1,282.21
	LEBIH (KURANG)	24,274,259,405.00	6,705,399,178.36	
	REALISASI (%)	-	98.04	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			
	TARGET	1,615,962,379,680.00	2,181,289,285,429.00	34.98
	REALISASI	2,073,511,146,883.00	2,468,192,489,590.87	19.03
	LEBIH (KURANG)	457,548,767,203.00	286,903,204,161.87	
	REALISASI (%)	128.31	113.15	

Sumber : Data Sementara Dispenda Provinsi Jambi 2012



Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan dari pemerintah, badan/lembaga/organisasi dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Untuk lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp.335.522.200.481,64. Dari semua Pos penerimaan tersebut maka *Total Realisasi APBD Provinsi Jambi TA.2012* adalah sebesar Rp.2.468.192.489.590,87 atau mencapai 113,15 % dari target yang ditetapkan, capaian penerimaan ini lebih besar 19,03 % dibandingkan dengan realisasi TA.2011.

D.1.1.3. Pendapatan Pajak Daerah

Secara umum pendapatan dari sektor Pajak Daerah pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp.806.939.200.432,00 atau 125,05 % dari target yang ditetapkan. Perkembangan pajak daerah Provinsi Jambi tahun 2011 s.d 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.11. Perkembangan pajak daerah di Provinsi Jambi tahun 2011 – 2012

NO	PAJAK	2011	2012*	+/- (%)
1	KENDARAAN BERMOTOR			
	TARGET	10,411,574,000.00	37,833,562,000.00	13.03
	REALISASI	257,250,390,702.00	274,997,858,908.00	6.90
	LEBIH (KURANG)	46,838,816,702.00	37,164,296,908.00	
	REALISASI (%)	122.26	115.63	
2	PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR			
	TARGET	66,000,000.00	-	-
	REALISASI	67,777,300.00	-	-
	LEBIH (KURANG)	1,777,300.00	-	
	REALISASI (%)	102.69	-	
3	BBN KENDARAAN BERMOTOR			
	TARGET	183,531,000,000.00	251,578,642,000.00	37.08
	REALISASI	396,544,939,977.00	330,688,092,400.00	(16.61)
	LEBIH (KURANG)	213,013,939,977.00	79,109,450,400.00	
	REALISASI (%)	216.06	131.45	
4	BBN KENDARAAN DI ATAS AIR			
	TARGET	800,000.00	-	-



REALISASI	1,821,100.00	-	-
LEBIH (KURANG)	1,021,100.00	-	-
REALISASI (%)	227.64	-	-
5	BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR		
TARGET	137,760,000,000.00	155,120,000,000.00	12.60
REALISASI	183,844,593,314.00	200,216,154,800.00	8.91
LEBIH (KURANG)	46,084,593,314.00	45,096,154,800.00	
REALISASI (%)	133.45	129.07	
6	PENGAMBILAN DAN PEMAMFAATAN AIR PERMUKAAN		
TARGET	743,200,000.00	785,375,667.00	5.67
REALISASI	1,142,006,806.00	1,037,094,324.00	(9.19)
LEBIH (KURANG)	398,806,806.00	251,718,657.00	
REALISASI (%)	153.66	132.05	
JUMLAH PAJAK DAERAH			
TARGET	532,512,574,000.00	645,317,579,667.00	21.18
REALISASI	838,851,529,199.00	806,939,200,432.00	(3.80)
[	306,338,955,199.00	161,621,620,765.00	
REALISASI (%)	157.53	125.05	

Sumber : Data sementara Dispenda Provinsi Jambi tahun 2012

Jika dilihat, bahwa PKB, BBN-KB dan PBB-KB merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2012, PKB terealisasi sebesar Rp.274.997.858.908,00 atau 115,63 % dari target yang ditetapkan dan penerimaan jenis ini juga mengalami peningkatan sebesar 6,90 % jika dibandingkan dengan realisasi pada TA. 2011.

PBB-KB terealisasi sebesar Rp.200.216.154.800,00 atau 129,07 % dari target yang telah ditetapkan, realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun anggaran 2012 lebih besar 8,91 % dari realisasi penerimaan tahun 2011.

Penerimaan dari BBN-KB terealisasi sebesar Rp.330.688.092.400,00 atau 131,45 % di atas target yang ditetapkan.

Selain ketiga sumber penerimaan pajak daerah tersebut, penerimaan pajak lainnya yaitu Pajak air permukaan juga



memberikan kontribusi untuk Provinsi Jambi yang terealisasi sebesar Rp.1.037.094.324,00 atau 132,05 %. Diharapkan pada masa mendatang akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi.

D.1.1.4. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan dari retribusi daerah di Provinsi Jambi diperoleh dari Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Pemakaian kekayaan daerah. Penerimaan daerah tahun anggaran 2012 dari retribusi sebesar Pendapatan dari retribusi daerah di Provinsi Jambi diperoleh dari Retribusi Jasa Usaha Daerah, Jasa Umum serta retribusi Perizinan tertentu.

Penerimaan daerah tahun anggaran 2012 dari retribusi sebesar Rp.14.759.755.831,00 atau mencapai 132,23 % diatas target yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.12. Perkembangan Retribusi Daerah Tahun 2011 s.d. 2012

NO	RETRIBUSI DAERAH	2011	2012	+/- (%)
	TARGET	7,462,787,500.00	11,162,182,916.00	49.57
	REALISASI	10,183,535,639.00	14,759,755,831.00	44.94
	LEBIH (KURANG)	2,720,748,139.00	3,597,572,915.00	
	REALISASI (%)	136.46	132.23	

Sumber : Data sementara Dispenda Provinsi Jambi tahun 2012

D.1.1.5. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan dari jenis Lain-lain PAD yang sah terdiri Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, penerimaan Jasa Giro, Bunga Deposito, penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), Sumbangan Pihak Ketiga dan Penerimaan Lain-lain dan Lain-lain Penerimaan lain mencapai realisasi pada tahun 2012 Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Penerimaan Hibah dan Penerimaan Lain-lain yang pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp.335.522.200.481,64 .



Tabel 1.13. Perkembangan Lain-lain PAD Tahun 2011-2012

NO	LAIN-LAIN PAD	2011	2012*	+/- (%)
	TARGET	88,872,026,810.00	87,241,117,150.00	(1.84)
	REALISASI	109,305,400,005.28	133,302,861,317.00	21.95
	LEBIH (KURANG)	20,433,373,195.28	46,061,744,167.00	
	REALISASI (%)	122.99	152.80	

Sumber : Data sementara Dispenda Provinsi Jambi tahun 2012

D.1.1.6. Dana Perimbangan

Selama tahun 2012 penerimaan dari Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah terealisasi sebesar Rp.1.147.683.865.827,23 atau mencapai 105,71 % dari target yang telah ditetapkan, penetapan target inipun mengalami peningkatan sebesar 11,24 % dari tahun sebelumnya rincian sebagaimana tabel 3.6. (terlampir).

Realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 22,90 % dari target tahun 2011 yang pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp.566.046.365.827,23.

Target Dana alokasi umum pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 25,36 % dari target tahun 2011 dan telah terealisasi 100,00 % dengan capaian sebesar Rp.731.952.242.000,00.

Begitupula dengan dana alokasi khusus, pada tahun 2012 terjadi peningkatan target sebesar 32,09 % dibanding dengan target tahun 2011. Pada tahun 2012 Dana Alokasi Khusus telah terealisasi 100,00% dengan capaian sebesar Rp.32.673.320.000,00.



Tabel 1.14. Perkembangan Dana Perimbangan Periode 2011-2012

NO.	URAIAN	2011	2012*	+/- (%)
1	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK			
	TARGET	367,390,151,020.00	321,108,416,686.00	(12.60)
	REALISASI	460,575,260,927.00	566,046,365,827.23	22.90
	LEBIH (KURANG)	93,185,109,907.00	244,937,949,141.23	
	REALISASI (%)	125.36	176.28	
2	DANA ALOKASI UMUM			
	TARGET	583,882,413,000.00	731,952,242,000.00	25.36
	REALISASI	583,882,413,000.00	731,952,242,000.00	25.36
	LEBIH (KURANG)	-	-	
	REALISASI (%)	100.00	100.00	
3	DANA ALOKASI KHUSUS			
	TARGET	24,735,600,000.00	32,673,320,000.00	32.09
	REALISASI	24,735,600,000.00	32,673,320,000.00	32.09
	LEBIH (KURANG)	-	-	
	REALISASI (%)	100.00	100.00	
JUMLAH DANA PERIMBANGAN				
	TARGET	976,008,164,020.00	1,085,733,978,686.00	11.24
	REALISASI	1,069,193,273,927.00	1,330,671,927,827.23	



24.46

LEBIH (KURANG)	93,185,109,907.00	244,937,949,141.23
REALISASI (%)	109.55	122.56

Sumber : Data sementara Dispenda Provinsi Jambi tahun 2012

D.1.1.7. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Penerimaan Hibah dan Penerimaan Lain-lain yang pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp.335.522.200.481,64 .

Tabel 1.15. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Tahun 2011 s.d. 2012

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2011	2012*	+/- (%)
1	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS			
	TARGET	-	342,227,599,660.00	-
	REALISASI	24,274,259,405.00	335,522,200,481.64	1,282.21
	LEBIH (KURANG)	24,274,259,405.00	(6,705,399,178.36)	
	REALISASI (%)	-	98.04	
2	PENDAPATAN LAINNYA			
	TARGET	-	-	-
	REALISASI	-	-	-
	LEBIH (KURANG)	-	-	
	REALISASI (%)	-	-	
3	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
	TARGET	-	342,227,599,660.00	-



REALISASI	24,274,259,405.00	335,522,200,481.64	1,282.21
LEBIH (KURANG)	24,274,259,405.00	(6,705,399,178.36)	
REALISASI (%)	-	98.04	

Sumber : Data sementara Dispenda Provinsi Jambi

D.1.1.7. Permasalahan dan Solusi

Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan yaitu 56,13% dari total penerimaan daerah sedangkan PAD memberikan kontribusi sebesar 41,87% dari total pendapatan daerah. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan Provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini terjadi karena objek penerimaan (pajak dan retribusi) yang ada di Provinsi Jambi sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

Ada beberapa kendala dalam mengoptimalkan penerimaan disektor pajak dan retribusi daerah ini antara lain :

1. Di masing-masing UPT Dipenda Provinsi Jambi, belum dapat secara optimal mendeteksi secara akurat wajib PKB yang belum melunasi pajaknya pada tahun bersangkutan
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap peranan PKB dan BBN-KB sebagai sumber dana pembangunan daerah.
3. Kewenangan di beberapa Samsat masih belum optimal. Sedangkan status Samsat telah menjadi Samsat penuh, seperti Samsat Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Samsat Kabupaten Sarolangun.

Melihat permasalahan tersebut, maka ada beberapa solusi yang perlu untuk dilaksanakan antara lain ;

1. Mengoptimalkan Sistem *On Line* dimasing-masing UPTD Dipenda Provinsi Jambi melalui kerjasama dengan pihak Telkom, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak dan mempermudah dalam pengolahan data Pajak Kendaraan Bermotor.



2. Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat wajib pajak tentang pentingnya membayar PKB dan memutasikan kendaraannya untuk dana pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan peranan Samsat di beberapa UPTD yang sampai saat ini masih terbatas atau belum optimal dalam melayani wajib pajak.
4. Selain itu pencarian objek pajak baru yang potensial juga harus dilakukan terus menerus dalam rangka usaha ekstensifikasi pendapatan daerah.

E.1. Kondisi Belanja Daerah

E.1.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

E.1.2. Target dan Realisasi Belanja

Program Prioritas Pembangunan tahun anggaran 2012 sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya yang dijabarkan dalam



APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 dengan mengalokasikan anggaran secara proporsional kepada seluruh SKPD dengan satuan standar tertinggi. Alokasi target belanja daerah tahun 2012 sebesar Rp. 2.766.573.219.873,85 atau naik 21,46% dari tahun lalu yang terdiri dari alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Dari terget belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 2.558.369.755.995,46 atau naik 17,57% dari tahun lalu, capaian realisasi belanja daerah tahun 2011 hanya sebesar 90,24% dari target yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya target belanja tahun 2012 karena adanya kegiatan pada SKPD yang tidak dapat dilaksanakan sesuai target serta adanya keterbatasan waktu serta efisiensi dari berbagai pengeluaran namun tetap mengedepankan capaian target kinerja masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan.

E.1.3. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota serta belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 1.295.848.887.154,85 dan terealisasi sebesar Rp. 1.194.876.618.485,46 atau 92,21% lebih tinggi dari rencana anggaran.

Belanja Pegawai yang merupakan belanja gaji pegawai selama tahun 2012 terealisasi sebesar Rp. 447.060.489.787,00 atau 93,64% dari jumlah anggaran, belanja ini lebih besar 14,87% dari realisasi tahun sebelumnya.

Belanja Subsidi tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 292.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 237.500.000,- atau sebesar 81,34% dari jumlah anggaran, belanja subsidi ini mengalami peningkatan 3,85% dari total realisasi tahun lalu.

Belanja Hibah tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 356.592.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 339.330.947.000,- atau terealisasi sebesar 95,16%. Belanja bantuan sosial pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 65.500.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.075.500.000,- atau sebesar 48,90% penganggaran belanja bantuan sosial ini lebih besar dari tahun 2011.



Belanja bagi hasil tahun 2012 kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp. 306.383.149.636,65 dan telah terealisasi sebesar Rp. 298.917.433.020,71 atau sebesar 97,56%, Alokasi belanja ini lebih besar dari tahun 2011.

Belanja bagi hasil ini merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota yang terdiri dari belanja bagi hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB, Belanja Bagi Hasil Pajak Air permukaan, Belanja Bagi Hasil Pajak Air Bawah Tanah, Belanja Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air dan bagi hasil BBN Kendaraan di atas Air.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa tahun 2012 sebesar Rp. 79.667.200.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 74.860.635.677,75 atau 93,97% yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Sungai Penuh, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.394.113.000,- atau sebesar 23,94%.

E.1.4. Belanja Langsung

Komponen utama Belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang merupakan cerminan pelaksanaan kebijakan program pembangunan tahunan dan tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang ditetapkan setiap tahunnya. Komposisi penyediaan anggaran belanja langsung 54,80% dari total belanja daerah, hal ini mencerminkan bahwa struktur APBD Provinsi Jambi memberikan porsi yang cukup besar untuk pembangunan daerah.

Penyediaan anggaran belanja langsung tahun 2012 lebih tinggi dari anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar 58,24% dan 55,10% pada tahun 2011 dari total belanja daerah, yang dialokasi untuk Belanja pegawai sebesar Rp. 89.630.370.020,- atau terealisasi sebesar 93,89%, belanja barang dan jasa disediakan anggaran sebesar Rp. 657.840.900.069,- atau terealisasi sebesar 90,81% serta belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 723.253.062.630,- atau terealisasi sebesar 90,70%. Anggaran Belanja langsung tersebar pada 46 Satuan Kerja



Pemerintah Provinsi Jambi dan secara umum telah terealisasi 94,39% dari target belanja langsung.